



PENERIMAAN PAJAK PARIWISATA DI DKI JAKARTA: ANALISIS PENGARUH PDRB DAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK

*Ayu Mustika Purry Putri Pamungkas¹, Sabrina Naomi Warouw², Ruccy Parsaoran
Sagala³, Khoirunurrofik⁴, dan Lely Dyah Tri Sukmawati⁵

¹Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Jakarta

²Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Manado

³Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta

⁵Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

*Alamat Korespondensi: ayu.mustika@kemenkeu.go.id

Abstract

Jakarta's transformation into a global city requires stronger fiscal independence, particularly through the optimization of local revenue from the tourism sector. Despite significant sectoral economic growth, there remains a gap between tourism-related GRDP growth and the effectiveness of local tax collection, both across tax types and municipalities. Previous studies largely examine the GRDP tax relationship in isolation, without integrating tax performance indicators, and rarely incorporate the Covid-19 period using panel data for Jakarta's administrative regions. This study aims to analyze the impact of tourism-related sectoral GRDP on local tourism tax revenues and to evaluate the effectiveness of tourism tax collection in the Province of DKI Jakarta. The research employs a Fixed Effect Model panel regression covering five municipalities in DKI Jakarta from 2011 to 2023. The analysis is complemented by Location Quotient (LQ), tax effort, and tax buoyancy measures, as well as qualitative descriptive analysis using literature review, questionnaires, and SWOT analysis. The results indicate that tourism-related sectoral GRDP has a positive and significant effect on hotel, restaurant, and entertainment tax revenues. However, tax collection effectiveness varies across municipalities, with South Jakarta showing relatively strong performance, while East Jakarta remains suboptimal. All tourism-related taxes exhibit tax buoyancy values below one, indicating limited responsiveness to sectoral economic growth. The findings highlight the need for adaptive, area-based local tax policies, strengthened tax administration, and integrated tourism development strategies to enhance Jakarta's competitiveness as a global city.

Keywords: Sectoral GRDP; Regional Tax; Tourism; Tax Buoyancy; Tax Effort; Fiscal Policy



Abstrak

Transformasi Jakarta menuju kota global menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata. Meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih terdapat kesenjangan antara peningkatan PDRB sektoral dan efektivitas pemungutan pajak daerah, baik antarjenis pajak maupun antar kota. Penelitian sebelumnya menganalisis hubungan PDRB dan pajak secara parsial, tanpa mengintegrasikan pengukuran kinerja pemungutan pajak serta belum memasukkan periode pandemi Covid-19 dalam analisis data panel wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB sektoral pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata serta mengevaluasi efektivitas pemungutan pajaknya di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan regresi data panel *Fixed Effect Model* pada lima kota madya di DKI Jakarta periode 2011–2023. Analisis dilengkapi dengan *Location Quotient* (LQ), *tax effort*, dan *tax buoyancy*, serta analisis kualitatif deskriptif melalui kajian literatur, survei kuesioner, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektoral pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel, restoran, dan hiburan. Namun, efektivitas pemungutan pajak bervariasi antarwilayah, dengan Jakarta Selatan menunjukkan kinerja relatif tinggi dan Jakarta Timur masih belum optimal. Seluruh jenis pajak pariwisata memiliki nilai *tax buoyancy* di bawah satu, yang mengindikasikan rendahnya responsivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kebijakan pajak daerah yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah, penguatan administrasi perpajakan, serta pengembangan pariwisata yang terintegrasi guna mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global.

Kata Kunci: PDRB Sektoral; Pajak Daerah; Pariwisata; *Tax Buoyancy*; *Tax Effort*; Jakarta; Kebijakan Fiskal

JEL Classification: H21, R58, Z32

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jakarta mengalami perubahan status signifikan seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Status Jakarta akan beralih dari pusat pemerintahan menjadi pusat ekonomi nasional dan kota bisnis berskala global yang sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Transformasi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Jakarta untuk masuk ke jajaran

20 besar kota global pada tahun 2045, sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai target ini, Jakarta memerlukan pendanaan yang besar guna memperkuat infrastruktur, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi global. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, total kebutuhan pendanaan untuk mencapai status kota global diperkirakan mencapai Rp600 triliun (DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang besar ini, penggalan dan optimalisasi potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci penting. Dengan PAD yang optimal, Jakarta akan lebih mandiri dalam membiayai pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis yang penting bagi transformasi menjadi kota global.

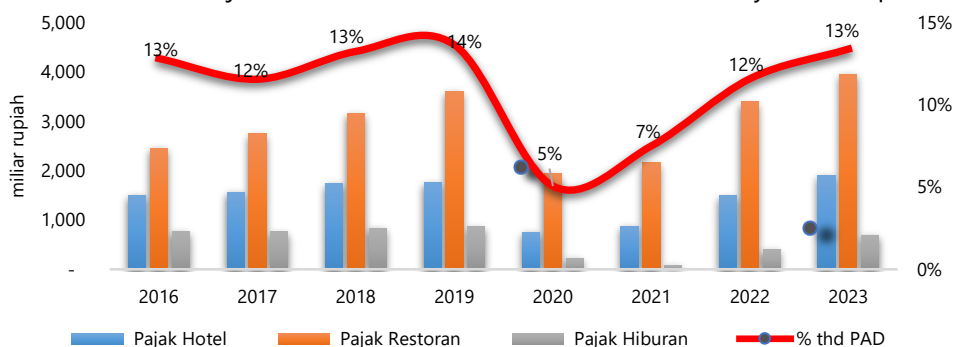
Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan adalah sektor pariwisata. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Haryati (2024), yang menyatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor penting yang harus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi Jakarta menuju status kota global. Pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel, berkontribusi cukup signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata setiap tahunnya, pajak daerah dari sektor pariwisata ini berkontribusi sebesar 11% terhadap total PAD Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara PDRB sektoral dan penerimaan pajak

pariwisata. Widayanti & Dewanti (2017) menemukan bahwa PDRB, jumlah hotel, dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata di Yogyakarta. Saputro (2014) menunjukkan bahwa jumlah objek wisata dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita turut memengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di DKI Jakarta. Di sisi lain, Harefa (2020) dan Prameswari (2022) menyimpulkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal akibat keterbatasan promosi dan infrastruktur. Sementara itu, Wadjaudje et al. (2018) menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Jakarta. Berbeda dari studi-studi tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis hubungan PDRB sektoral dengan pajak pariwisata, tetapi juga mengukur efektivitas pemungutan pajaknya menggunakan indikator *tax effort* dan *tax buoyancy*, serta mengaitkannya dengan konteks strategis transformasi Jakarta menjadi kota global.

Namun, meskipun kontribusi ini signifikan, penting untuk memastikan

Gambar 1 Realisasi Pajak Daerah Sektor Pariwisata dan Kontribusinya terhadap PAD



Sumber: BPS dan Bapenda DKI Jakarta (diolah)

bahwa pengembangan pariwisata yang dapat diukur dengan PDRB sektoral, secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Di samping itu, meski penelitian mengenai hubungan PDRB terhadap pajak daerah telah banyak dilakukan, sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang fokus pada pajak daerah sektor pariwisata di DKI Jakarta yang memasukkan periode pandemi Covid-19 dan menggunakan data panel. Untuk itu, penting untuk melihat pengaruh dari PDRB sektoral pariwisata terhadap pajak daerah sektor pariwisata di DKI Jakarta.

Selain pengembangan pariwisata, optimalisasi penerimaan pajak daerah sektor pariwisata juga perlu dilakukan dengan mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak daerah sektor pariwisata tersebut. Untuk itu, perlu diukur efektivitas pemungutan pajak daerah sektor pariwisata yang selama ini telah dilakukan. Pengukuran efektivitas pemungutan pajak daerah dilakukan dengan mengukur *tax effort* dan *tax buoyancy*, yang mengacu pada efektivitas administrasi pajak dan kemampuan pajak untuk meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Penerapan strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Lebih lanjut, kebijakan pajak memainkan peran penting dalam industri pariwisata (Safarov et al., 2023). Pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha pariwisata dapat meningkatkan daya saing Jakarta dalam menarik wisatawan domestik dan internasional serta mempercepat perkembangan industri pariwisata. Kebijakan pajak yang

tepat sangat penting untuk mendorong pengembangan industri pariwisata secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD sekaligus mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing Jakarta di kancah global. Saat ini, Jakarta masih belum sejajar dengan kota-kota global terkemuka, seperti yang tercermin dalam berbagai indeks kota global. Dalam *Global Cities Index 2023* oleh Kearney, Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota, sedangkan dalam *Global Power Cities Index 2023*, Jakarta hanya menempati posisi ke-45 dari 48 kota. Bahkan, dalam *Global Cities Index 2024* oleh Oxford, Jakarta berada di peringkat ke-284 dari 1.000 kota, jauh tertinggal dari kota-kota global lainnya.

Salah satu indikator penting yang memengaruhi peringkat Jakarta adalah *Quality of Life*, di mana Jakarta menempati peringkat ke-741. Aspek ini dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah tempat rekreasi, acara budaya, serta infrastruktur pariwisata. Indikator-indikator ini berhubungan erat dengan sektor pariwisata, yang tidak hanya berperan sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai faktor yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, semakin baik infrastruktur pariwisata dan semakin banyak tempat rekreasi yang tersedia, semakin tinggi pula tingkat kenyamanan dan kualitas hidup yang dirasakan oleh penduduk dan pengunjung kota. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan sangat penting, karena selain berkontribusi pada pendapatan daerah, sektor ini juga

berperan dalam meningkatkan *Quality of Life*, yang secara langsung akan memengaruhi posisi Jakarta dalam indeks-indeks kota global. Dengan demikian, analisis mengenai kesenjangan dalam pengembangan sektor pariwisata Jakarta menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana perbaikan sektor ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan peringkat Jakarta dalam indeks global, sekaligus mendukung tujuan jangka panjang Jakarta sebagai kota global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh PDRB sektoral terhadap pajak daerah sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta, bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah sektor pariwisata di provinsi DKI Jakarta, bagaimana kebijakan pajak daerah sektor pariwisata di provinsi DKI Jakarta dapat dioptimalkan untuk memajukan industri pariwisata, dan apa saja kesenjangan sektor pariwisata di Jakarta yang perlu diatasi untuk meningkatkan peringkat Jakarta di *Global Cities Index*.

Penelitian mengenai hubungan antara PDRB dan penerimaan pajak daerah sektor pariwisata telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat parsial dan terbatas pada pengujian hubungan langsung tanpa mengevaluasi kinerja dan efektivitas pemungutan pajak secara komprehensif. Studi terdahulu umumnya belum mengintegrasikan *tax effort* dan *tax buoyancy* dalam analisis, belum menggunakan data panel lintas kota madya di DKI Jakarta, serta belum memasukkan periode pandemi Covid-19 sebagai faktor penting yang

memengaruhi kinerja pajak daerah. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengombinasikan analisis pengaruh PDRB sektoral pariwisata terhadap pajak hotel, restoran, dan hiburan menggunakan pendekatan data panel, sekaligus menilai efektivitas dan responsivitas pemungutan pajak daerah dalam konteks penguatan kemandirian fiskal Jakarta.

TINJAUAN LITERATUR

Berbagai penelitian telah membahas hubungan antara perkembangan sektor pariwisata, yang diukur melalui PDRB sektoral, dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah. Harefa (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Belitung menemukan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah melalui Pajak hotel dan restoran meski positif, belum signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan promosi untuk memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata. Prameswari (2022) juga menunjukkan hasil serupa di Kabupaten Kapuas Hulu, di mana sektor pariwisata tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD, tetapi kegiatan promosi memiliki pengaruh signifikan.

Widayanti & Dewanti (2017), yang meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan bahwa PDRB, jumlah hotel, dan jumlah restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata. Temuan ini memperkuat posisi PDRB sebagai faktor utama yang menentukan penerimaan pajak dari sektor pariwisata. Apriyanti et al. (2023) di Provinsi Bali juga menekankan bahwa secara simultan, variabel-variabel seperti

jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial.

Di Jakarta, Wadjaudje et al. (2018) mengidentifikasi bahwa jumlah wisatawan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal memiliki dampak positif signifikan terhadap PAD, terutama dari sektor pajak hiburan, hotel, dan restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saputro (2014), yang menganalisis periode 2002-2012 dan menemukan bahwa jumlah objek wisata, kunjungan wisatawan nusantara, dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di DKI Jakarta. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa di Jakarta, perkembangan sektor pariwisata memiliki korelasi kuat dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti bahwa PDRB sektoral pariwisata secara konsisten memberikan kontribusi positif terhadap pajak daerah sektor pariwisata, baik secara langsung melalui pajak hotel, restoran, dan hiburan, maupun secara tidak langsung melalui promosi pariwisata dan pengembangan infrastruktur. Namun, penting juga untuk memperhatikan kebijakan perpajakan dan promosi yang efektif agar dampak ekonomi dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan, terutama di kota besar seperti Jakarta yang memiliki potensi besar dalam sektor ini.

Tax effort merupakan konsep yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan potensi pajaknya. Wang et al., (2009) mendefinisikan *tax effort* sebagai rasio antara pajak yang

sebenarnya dikumpulkan terhadap kapasitas pajak yang diperkirakan. Studi mereka pada pemerintah provinsi di Tiongkok menunjukkan bahwa *tax effort* bervariasi secara signifikan di setiap provinsi, mencerminkan perbedaan dalam kemampuan dan upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak. Jika *tax effort* tinggi, maka artinya pemerintah telah mampu memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada. Sebaliknya, *tax effort* yang rendah menunjukkan bahwa masih ada potensi yang belum tergali secara maksimal, baik akibat kelemahan dalam kebijakan pajak, penegakan pajak, maupun administrasi pemungutan pajak.

Tax buoyancy merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *responsiveness* penerimaan pajak terhadap perubahan ekonomi, khususnya PDRB. Indikator ini mencerminkan seberapa besar perubahan penerimaan pajak sebagai respons terhadap perubahan PDRB sektoral secara keseluruhan, baik karena perubahan kebijakan maupun pertumbuhan alami basis pajak. Jika nilai *tax buoyancy* lebih besar dari 1, maka penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan sistem perpajakan yang responsif. Sebaliknya, nilai di bawah 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kurang responsif terhadap dinamika ekonomi dan mengindikasikan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal.

Dalam konteks pajak sektor pariwisata, *tax buoyancy* dapat menjadi alat analisis untuk menilai efektivitas

pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Misalnya, nilai *tax buoyancy* pajak hotel di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing mendekati 1, yang berarti cukup sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sektoral. Sebaliknya, pajak hiburan di hampir seluruh wilayah menunjukkan nilai *tax buoyancy* yang jauh di bawah 1, mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap kontraksi ekonomi seperti pada masa pandemi, dan potensi pemulihan yang lambat.

Lebih lanjut, Sipayung et al., (2024) menekankan pentingnya membedakan antara *tax buoyancy* dan *tax elasticity*. *Tax buoyancy* mengukur elastisitas penerimaan pajak secara menyeluruh termasuk efek dari perubahan kebijakan, sedangkan *tax elasticity* mengisolasi pengaruh perubahan basis pajak dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan. Dengan memahami perbedaan ini, analisis *tax buoyancy* dapat digunakan untuk menilai kebutuhan reformasi pajak sekaligus mengukur kinerja aktual dari sistem perpajakan daerah.

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019), yaitu selain memiliki fungsi *budgetair* untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* sebagai alat yang dapat digunakan pemerintah dalam mengatur baik bidang sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, memanfaatkan pajak daerah untuk mendorong pengembangan industri pariwisata bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Lebih lanjut, menurut OECD (2014) pajak pariwisata dapat berupa pajak yang dikenakan secara umum terhadap berbagai aktivitas usaha, termasuk di dalamnya yang terkait pariwisata (contoh: PPN), maupun berupa pajak yang spesifik dikenakan terhadap aktivitas tertentu yang terkait pariwisata (contoh: pajak hotel).

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) dan Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) (2018) mendefinisikan insentif pajak sebagai perlakuan perpajakan khusus yang diterapkan terhadap kelompok wajib pajak tertentu, dapat berupa pengecualian, *tax holidays*, tarif pajak khusus, atau penangguhan kewajiban perpajakan.

Secara lebih spesifik, tujuan dari pemberian insentif pajak adalah mengoreksi pasar yang tidak efisien akibat aktivitas ekonomi tertentu, memfokuskan pengembangan industri-industri baru dan investasi yang fleksibel serta rentan terhadap persaingan pajak, membentuk kawasan ekonomi khusus, dan memberikan subsidi kepada pelaku usaha di sektor yang sedang mengalami kontraksi (UN & CIAT, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif menggunakan data primer berupa kuesioner yang diisi Badan Penerimaan Daerah DKI Jakarta (Bapenda) selaku regulator dan *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) selaku pelaku usaha sektor pariwisata. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang bersumber dari

Pemprov DKI Jakarta, BPS, dan Kemenkeu.

Metode analisis kuantitatif dengan regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata. Penelitian menggunakan observasi level kota madya sebanyak 5 kota madya di Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Dalam analisis ini, Kepulauan Seribu digabungkan dengan Jakarta Utara untuk mempermudah integrasi data pajak daerah dan PDRB, serta mengurangi potensi distorsi dalam estimasi variabel ekonomi.

Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, serta *variable of interest* yaitu PDRB sektoral pariwisata yaitu PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum serta PDRB Jasa Lainnya. Agar diperoleh hasil estimasi yang lebih akurat, penelitian menggunakan variabel kontrol, yaitu jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja, jumlah akomodasi, dan *dummy* Covid-19.

Metode yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh tersebut adalah *Fixed Effect Model* (Model FE). Model FE dipilih karena memberikan estimasi yang lebih baik dalam mengontrol faktor-faktor antar-kota madya yang tidak terukur dan mungkin tidak berubah sepanjang waktu (Wooldridge, 2020). Spesifikasi ekonometrik yang digunakan sebagaimana ditunjukkan pada persamaan, di mana: i adalah kota madya, t adalah tahun. $\ln_pajak_sektor_pariwisata$ adalah penjumlahan dari realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan penggunaan logaritma natural ($\ln$). $\ln_pajak_hotel$ adalah realisasi penerimaan pajak hotel dengan penggunaan $\ln$. $\ln_pajak_restoran$ adalah realisasi penerimaan pajak restoran dengan penggunaan $\ln$. $\ln_pajak_hiburan$ adalah realisasi penerimaan pajak hiburan dengan penggunaan $\ln$. $\ln_PDRB_sektor_pariwisata$ adalah penjumlahan dari PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya dengan penggunaan $\ln$.

Tabel 1 Daftar Persamaan Penelitian

No	Persamaan
1	$\ln_Pajak_Sektor_Pariwisata_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln_PDRB_Sektor_Pariwisata_{it} + \beta_2 \ln_tenaga_kerja_{it} + \beta_3 \ln_akomodasi_{it} + \beta_4 dmcovid_{it} + \mu_{it}$
2	$\ln_Pajak_Hotel_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln_PDRB_akomodasi_makan_minum_{it} + \beta_2 \ln_tenaga_kerja_{it} + \beta_3 \ln_akomodasi_{it} + \beta_4 dmcovid_{it} + \mu_{it}$
3	$\ln_Pajak_Restoran_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln_PDRB_akomodasi_makan_minum_{it} + \beta_2 \ln_tenaga_kerja_{it} + \beta_3 dmcovid_{it} + \mu_{it}$
4	$\ln_Pajak_Hiburan_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln_PDRB_jasa_lainnya_{it} + \beta_2 \ln_tenaga_kerja_{it} + \beta_3 dmcovid_{it} + \mu_{it}$
5	$LQ = \frac{PDRB\ sektor\ i\ di\ kota\ madya\ x}{Total\ PDRB\ di\ kota\ madya\ x} : \frac{PDRB\ sektor\ i\ di\ provinsi\ atau\ nasional}{Total\ PDRB\ di\ provinsi\ atau\ nasional}$
6	$Tax\ Effort = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{PDRB}$
7	$\ln_PenerimaanPajak_t = \beta_0 + \beta_1 \ln_PDRB_t + \beta_2 dmcovid_t + \mu_t$

$\ln_PDRB_akomodasi_makan_minum$ adalah PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan penggunaan $\ln$. $\ln_PDRB_jasa_lainnya$ adalah PDRB lapangan usaha jasa lainnya dengan penggunaan $\ln$. $\ln_tenaga_kerja$ adalah jumlah penduduk berusia 15 th ke atas yang bekerja dengan penggunaan $\ln$. $\ln_akomodasi$ adalah jumlah akomodasi dengan penggunaan $\ln$. $Dmccovid$ adalah dummy pandemi Covid-19. μ adalah error term.

Untuk menganalisis lebih mendalam atas hasil estimasi PDRB sektoral terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata, peneliti melakukan pemetaan sektor unggulan dengan analisis *Location Quotient* (LQ) dengan Persamaan 5.

Selanjutnya, dalam menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah sektor pariwisata di Jakarta, dilakukan juga analisis *tax effort* dan *tax buoyancy*. *Tax effort* dihitung dengan Persamaan 6.

Analisis *tax effort* pada pajak daerah sektor pariwisata Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pemungutan pajak di sektor ini serta membantu mengidentifikasi area di mana kebijakan pajak dapat ditingkatkan.

Analisis *tax buoyancy* dilakukan untuk mengukur elastisitas penerimaan pajak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB sektor tersebut di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerimaan pajak merespons dinamika ekonomi sektoral. Estimasi dilakukan menggunakan model regresi log-log sebagaimana Persamaan 7.

Di mana β_1 merepresentasikan tingkat *tax buoyancy*, dan $dmcovid$ adalah variabel *dummy* untuk mengontrol dampak pandemi COVID-19, dengan nilai 1 untuk tahun 2020–2022 dan 0 untuk tahun lainnya. Penambahan *dummy* ini bertujuan menangkap potensi gangguan eksternal yang bersifat sementara terhadap penerimaan pajak. Meskipun tidak secara eksplisit membahas *tax buoyancy*, pendekatan Sipayung et al. (2024) menekankan pentingnya pengukuran efektivitas pemungutan pajak melalui indikator rasio dan efisiensi, yang relevan secara konseptual dengan pendekatan elastisitas ini.

Untuk menganalisis kebijakan pajak daerah sektor pariwisata dalam rangka memajukan industri pariwisata di Jakarta dan menganalisis kesenjangan utama sektor pariwisata untuk meningkatkan peringkat Jakarta di *Global Cities Index* digunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian literatur dan regulasi serta analisis SWOT yang didukung dengan metode survei kuesioner dari Bapenda, ASITA, dan PHRI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi dengan variasi variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan penambahan variabel kontrol berdampak pada perubahan koefisien beta dan nilai *R-squared*. Nilai *R-squared* pada model ke-4 sebesar 0.875 menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan sekitar 87.5% variabilitas dalam pajak daerah sektor pariwisata, yang berarti model ini cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pajak sektor pariwisata.

Hasil estimasi menunjukkan PDRB yang terkait sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap pajak daerah sektor pariwisata. Secara rata-rata, peningkatan PDRB yang terkait sektor pariwisata sebesar 1% berkorelasi terhadap peningkatan pajak daerah sektor pariwisata sebesar 1,26%, *ceteris paribus*. Hasil ini mendukung hasil penelitian Saputro (2014) dan Wadjaudje et al. (2018).

PDRB sektor pariwisata adalah variabel yang paling kuat memengaruhi pajak daerah sektor pariwisata. Ini memperkuat pentingnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan daerah, yang sangat relevan dalam kebijakan peningkatan PAD DKI Jakarta. Berdasarkan hasil ini, pemerintah perlu terus mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata. Kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, promosi wisata, dan

penyediaan fasilitas akomodasi yang berkualitas dapat memberikan kontribusi positif terhadap pajak daerah.

Selain PDRB Sektor Pariwisata, variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah sektor pariwisata adalah variabel *dummy* Covid-19. Berdasarkan hasil estimasi, pandemi Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak daerah sektor pariwisata. Dari koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah sektor pariwisata saat terjadi pandemi Covid-19 lebih rendah 43,2% dibandingkan saat tidak ada pandemi Covid-19, *ceteris paribus*.

Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi PDRB sektoral terhadap masing-masing jenis pajak daerah sektor pariwisata. Hasil estimasi masih sejalan dengan hasil estimasi sebelumnya. Setiap jenis pajak daerah sektor pariwisata terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB

Tabel 2 Hasil Estimasi Pengaruh PDRB Sektoral terhadap Pajak Daerah Sektor Pariwisata

	<i>Dependent Variable: Pajak Daerah Sektor Pariwisata</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Sektor Pariwisata	0.907*** (0.116)	0.883*** (0.102)	1.152*** (0.108)	1.262*** (0.127)
<i>Controls:</i>				
Tenaga Kerja		0.858** (0.285)	0.826* (0.371)	0.433 (0.251)
Akomodasi			-0.271** (0.092)	-0.139 (0.071)
<i>Dummy</i> Covid-19				-0.432*** (0.059)
<i>Constant</i>	17.711*** (1.223)	6.207 (3.489)	5.068 (4.479)	8.791** (2.404)
<i>Observations</i>	65	65	65	65
<i>R-Squared</i>	0.647	0.660	0.696	0.875
<i>Number of kota madya</i>	5	5	5	5

Catatan: Seluruh variabel menggunakan logaritma natural. ***, **, dan * menunjukkan signifikansi statistik pada 1%, 5%, dan 10% secara berturut-turut.

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 3 Hasil Estimasi Pengaruh PDRB Sektoral terhadap Pajak Daerah Sektor Pariwisata per Jenis Pajak Daerah

	<i>Dependent Variable</i>		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.955*** (0.101)	1.579*** (0.080)	
PDRB Jasa Lainnya			0.971*** (0.115)
<i>Controls:</i>			
Tenaga Kerja	0.342 (0.490)	0.352 (0.171)	-1.138** (0.374)
Akomodasi	-0.035 (0.025)		
Dummy Covid-19	-0.505*** (0.027)	-0.241*** (0.040)	-1.443*** (0.097)
Constant	11.914 (6.148)	6.204** (1.793)	31.622*** (4.343)
Observations	65	65	65
R-Squared	0.802	0.943	0.733
Number of prov	5	5	5

Catatan: Seluruh variabel menggunakan logaritma natural. ***, **, dan * menunjukkan signifikansi statistik pada 1%, 5%, dan 10% secara berturut-turut.

Sumber: Diolah peneliti

sektoral masing-masing. PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum berpengaruh positif signifikan terhadap pajak hotel. Secara rata-rata, peningkatan PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1% berkorelasi terhadap peningkatan pajak hotel sebesar 0,96%, *ceteris paribus*. PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga berpengaruh positif signifikan terhadap pajak restoran. Secara rata-rata, peningkatan PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1% berkorelasi terhadap peningkatan pajak hotel sebesar 1,58%, *ceteris paribus*. PDRB lapangan usaha jasa lainnya berpengaruh positif signifikan terhadap pajak hiburan. Secara rata-rata, peningkatan PDRB jasa lainnya sebesar 1% berkorelasi terhadap

peningkatan pajak hiburan sebesar 0,97%, *ceteris paribus*.

Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kegiatan jasa lainnya berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Hasil ini menegaskan kembali perlunya mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata untuk meningkatkan pajak daerah.

Berdasarkan hasil pemetaan sektor unggulan dengan perhitungan LQ sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 (Perhitungan LQ pada Lampiran 1), penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor unggulan di Jakarta Timur. Sementara

Tabel 4 Pemetaan Sektor Unggulan di Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan	Jasa Lainnya Jasa Perusahaan	Industri Pengolahan Transportasi dan Pergudangan	Jasa Keuangan dan Asuransi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Informasi dan Komunikasi Transportasi dan Pergudangan
Konstruksi	Informasi dan Komunikasi	Jasa Pendidikan	Jasa Perusahaan	Konstruksi
Transportasi dan Pergudangan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Jasa Keuangan dan Asuransi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Jasa Pendidikan	Real Estat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Real Estat	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			Jasa Pendidikan
				Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sumber: Diolah peneliti

itu, jasa lainnya menjadi salah satu sektor unggulan di Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut dan hasil analisis sebelumnya, maka seharusnya Jakarta Timur dapat unggul dalam pencapaian realisasi pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan Jakarta Selatan dapat unggul dalam pencapaian realisasi pajak hiburan. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak daerah per kota madya tahun 2011-2023 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar

2 menunjukkan bahwa Jakarta Timur justru menempati peringkat terendah pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan efektivitas pemungutan pajak di Jakarta Timur. Diindikasikan faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur pendukung, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, atau masih adanya kelemahan dalam administrasi pajak daerah dapat

menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pajak di wilayah ini.

Sementara itu, di Jakarta Selatan, realisasi penerimaan pajak hiburan ternyata masih berada di bawah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta Selatan memiliki potensi besar di sektor hiburan, ada faktor-faktor yang menghambat pencapaian optimal di bidang ini. Beberapa kemungkinan kendala yang dapat memengaruhi realisasi pajak hiburan di Jakarta Selatan termasuk daya saing dengan wilayah lain yang memiliki lebih banyak destinasi hiburan atau kurang optimalnya promosi dan pengembangan sektor hiburan di wilayah tersebut.

Dalam menganalisis efektivitas pemungutan pajak dilakukan analisis *tax effort*. *Tax effort* pajak daerah sektor pariwisata DKI Jakarta masing-masing kota madya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada Lampiran 2.

Jenis pajak daerah sektor pariwisata dengan rata-rata *tax effort* paling tinggi adalah pajak restoran, sementara paling rendah adalah pajak hiburan. *Tax effort* pada pajak hiburan yang rendah menandakan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak dari sektor hiburan sehingga diperlukan peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak di sektor ini. Di sisi lain, *tax effort* yang tinggi di pajak restoran menunjukkan bahwa sektor ini lebih efektif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Tax effort Jakarta Selatan pada pajak restoran paling tinggi dibanding kota madya lain dan cukup tinggi pada pajak hotel. Akan tetapi, pajak hiburan di

Jakarta Selatan masih menunjukkan kinerja yang cukup rendah dibandingkan kota madya lainnya. Hal ini masih sejalan dengan hasil analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa Jakarta Selatan belum dapat memaksimalkan potensinya pada pajak hiburan.

Jakarta Timur menunjukkan rata-rata *tax effort* paling rendah dibandingkan kota madya lain. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk optimalisasi pemungutan pajak di Jakarta Timur tersebut, terutama mengingat potensi yang dapat dikembangkan dari kegiatan ekonomi pariwisata di wilayah ini.

Tabel 5 *Tax Buoyancy* Pajak Sektor Pariwisata

Kota madya	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
Jakarta Utara	0,8074	0,6236	0,5113
Jakarta Selatan	0,7950	0,5871	0,5858
Jakarta Timur	0,7711	0,5403	0,7103
Jakarta Pusat	0,9886	0,7341	0,4803
Jakarta Barat	0,9815	0,5818	0,5353

Sumber: Diolah peneliti

Selain *tax effort*, dilakukan pula perhitungan *tax buoyancy* untuk pajak sektor pariwisata. Nilai *tax buoyancy* mencerminkan seberapa responsif penerimaan pajak terhadap perubahan PDRB sektoral. Tabel 5 merangkum nilai *tax buoyancy* untuk masing-masing jenis pajak dan wilayah administrasi DKI Jakarta pada periode 2011–2023.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai *tax buoyancy* paling tinggi di Jakarta Pusat (0,9886) dan Jakarta Barat (0,9815), mendekati nilai 1, yang berarti penerimaan pajaknya hampir sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sektoral. Sebaliknya, Jakarta Timur memiliki nilai

tax buoyancy pajak hotel paling rendah (0,7711), mengindikasikan respons yang relatif lemah terhadap pertumbuhan PDRB sektoral dan adanya potensi fiskal yang belum tergalai optimal.

Untuk pajak restoran, nilai *tax buoyancy* tertinggi terdapat di Jakarta Pusat (0,7341), sementara nilai terendah terdapat di Jakarta Timur (0,5403). Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Jakarta Timur belum sebanding dengan pertumbuhan sektor ekonomi terkait, sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi pemungutan pajak.

Sementara itu, pajak hiburan menunjukkan nilai *tax buoyancy* tertinggi di Jakarta Timur (0,7103), namun tetap berada di bawah 1 di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan merupakan jenis pajak yang paling tidak responsif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga paling rentan saat terjadi kontraksi ekonomi seperti masa pandemi. Nilai *tax buoyancy* yang rendah secara konsisten, terutama di Jakarta Pusat (0,4803) dan Jakarta Utara (0,5113), memperkuat temuan bahwa sektor hiburan paling terdampak oleh fluktuasi PDRB.

Secara umum, seluruh jenis pajak sektor pariwisata di semua wilayah DKI Jakarta menunjukkan nilai *tax buoyancy* < 1 , yang berarti pertumbuhan pajak masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pariwisata memiliki potensi besar, mekanisme pemungutan pajak masih dapat ditingkatkan agar lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama untuk jenis pajak hiburan.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pajak daerah sektor pariwisata

di provinsi DKI Jakarta dapat dimanfaatkan untuk memajukan industri pariwisata, maka dilakukan analisis kebijakan dengan memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan terkait kebijakan pajak daerah sektor pariwisata. Diawali dengan membuat kuesioner untuk mengetahui pandangan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pajak terkait pariwisata, baik yang sudah pernah diimplementasikan, maupun rencana dan harapan untuk masa yang akan datang, serta optimisme terhadap visi Jakarta untuk menjadi kota global dikaitkan dengan sektor pariwisata. Kuesioner dibagikan kepada Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan, pelaku usaha pariwisata yang diwakili oleh *Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Jawaban dari para responden menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata melalui kebijakan pajak, masih ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pariwisata Jakarta menuju kota global yang berdaya saing. Dari perspektif pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi adalah ketidakpastian regulasi dan belum adanya rencana untuk merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong sektor pariwisata secara khusus, serta terbatasnya basis data yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah. Dari sisi pelaku usaha, sulitnya akses informasi mengenai kebijakan pajak dan insentif

yang dapat dimanfaatkan menjadi salah satu tantangan, di samping rumitnya prosedur untuk memperoleh fasilitas atau insentif yang diberikan pemerintah. Karena itu para pelaku usaha kurang atau bahkan tidak memiliki pengalaman dalam pemanfaatan insentif pajak, sehingga tidak banyak yang dapat merasakan dampak dari kebijakan pajak terhadap usaha mereka di sektor pariwisata.

Berdasarkan publikasi Bapenda DKI Jakarta pada situs resminya di bapenda.jakarta.go.id, Pemerintah DKI Jakarta telah mengimplementasikan beberapa kebijakan pajak seperti pengurangan sanksi administrasi di akhir tahun 2021, serta digitalisasi administrasi mulai dari pendataan objek pajak baru antara lain untuk pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran, penagihan pajak daerah, sampai digitalisasi pemeriksaan pajak, serta pengembangan platform untuk layanan informasi, pengaduan, serta administrasi pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi berupa *Manless Branch Kiosk*. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan yang telah diambil belum spesifik untuk mengerakkan sektor pariwisata. Fakta ini terkonfirmasi dengan jawaban kuesioner yang menyatakan bahwa belum ada insentif pajak yang pernah diberikan khusus untuk industri pariwisata, dan para pelaku usaha kurang merasakan dampak dari kebijakan perpajakan yang berlaku terhadap usaha mereka.

Meskipun demikian, baik di sisi pemerintah maupun sisi pelaku usaha terdapat peluang yang terbuka untuk pengembangan industri pariwisata di Jakarta. Hal ini didukung pula dengan

respons kuesioner yang menunjukkan adanya optimisme dari kedua belah pihak mengenai prospek pengembangan wisata Jakarta dalam mewujudkan visinya sebagai kota global. Baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa kebijakan perpajakan seperti pemberian insentif penting dalam mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Bahkan pelaku usaha di bidang perhotelan merasakan bagaimana insentif pajak yang diberikan pada masa pandemi Covid-19 berhasil membantu mereka meningkatkan *profit* dan memperkuat daya saing usaha mereka. Di sisi pemerintah, kesadaran akan pentingnya pembuatan kebijakan pajak yang tepat antara lain diwujudkan dengan rencana penyesuaian tarif pajak hiburan yang akan diturunkan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lebih lanjut, Bapenda juga terus menggalakkan digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi administrasi dan pendataan.

Kesadaran dan optimisme yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan terhadap industri pariwisata untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global menjadi modal yang cukup untuk percepatan pertumbuhan pariwisata di Jakarta terutama melalui perumusan kebijakan yang tepat serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang optimal. Namun, penting untuk dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan di atas.

Penelitian tentang hubungan pajak dengan industri pariwisata pernah dilakukan oleh Safarov et al. (2023) di

Uzbekistan. Hasilnya, pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi di industri pariwisata. Mereka juga mendapati bahwa terdapat dua sisi dari perpajakan yang dapat dihubungkan dengan pengembangan pariwisata. Yang pertama, penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk fasilitas layanan publik, proyek infrastruktur, dan kegiatan promosi, yang dapat mendukung sektor pariwisata. Di sisi lain, pajak juga berperan sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengatur aktivitas pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengelola arus wisatawan.

Sementara itu menurut OECD (2014), kebijakan pajak terkait pariwisata dapat dilakukan melalui pajak tidak langsung (*indirect tax*) yang lebih efektif jika pengaturannya dilakukan secara regional. Dihubungkan dengan perpajakan daerah DKI Jakarta, maka pajak daerah yang terkait pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, merupakan pajak konsumsi yang juga dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengatur pajak ini, maka sejalan dengan pernyataan OECD dan Safarov et al. (2023), pajak daerah terkait pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi di sektor ini, baik untuk mendukung pertumbuhannya maupun dalam meningkatkan daya saing dan menarik peluang investasi yang lebih besar.

Dengan strategi yang tepat, pemerintah DKI Jakarta dapat menghasilkan kebijakan pajak yang efektif dan dapat diimplementasikan secara optimal untuk mengembangkan

sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan daya saing Jakarta sebagai destinasi wisata yang kompetitif menuju cita-cita menempati peringkat dua puluh besar kota global di tahun 2045.

Analisis kesenjangan utama sektor pariwisata untuk meningkatkan peringkat Jakarta di *global cities index* dilakukan dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Jakarta dalam mengembangkan sektor pariwisatanya untuk meningkatkan posisinya di tingkat global.

Beberapa lembaga pemeringkat global telah merilis indikator yang digunakan dalam *global cities index*. Misalnya, *global cities index* oleh Oxford menggunakan lima indikator: *economics*, *human capital*, *quality of life*, *environment*, and *governance*. *Quality of life*, yang mencakup tempat rekreasi dan budaya, berkaitan erat dengan pariwisata. Indikator lain dari *global cities index* oleh Kearney menilai keterlibatan budaya dan akses ke museum, acara budaya, serta acara olahraga besar. Selain itu, *global power cities index* juga menggunakan indikator interaksi budaya, yang mencakup potensi tren, sumber daya pariwisata, dan fasilitas budaya.

Berdasarkan indikator-indikator yang tersebut, kami mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Jakarta menggunakan analisis SWOT berdasarkan dokumen renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta dan survei kepada pelaku usaha pariwisata setempat.

Jakarta memiliki keunggulan dalam hal keberagaman budaya dan atraksi

wisata, mulai dari sejarah, budaya, kuliner, hingga hiburan modern. Jakarta juga dilengkapi dengan hotel, restoran, dan tempat hiburan berstandar internasional yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan global. Sebagai pusat bisnis dan keuangan, Jakarta juga memiliki keunggulan di sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*), yang dapat menarik banyak wisatawan internasional.

Meskipun demikian, Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat potensinya sebagai destinasi wisata global. Masalah seperti keterbatasan lahan parkir yang memperparah kemacetan, minimnya fasilitas pejalan kaki, serta kurangnya ruang terbuka hijau dibandingkan kota global lainnya merupakan masalah lama yang belum terselesaikan. Masalah polusi udara dan kebersihan lingkungan juga mengurangi daya tarik Jakarta sebagai destinasi wisata. Selain itu, promosi pariwisata Jakarta di tingkat internasional masih kurang agresif, dengan keterbatasan penerbangan langsung dibandingkan destinasi seperti Bangkok atau Singapura.

Jakarta memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisatanya melalui diversifikasi atraksi wisata seperti wisata budaya, sejarah, dan hiburan malam, yang dapat memperpanjang lama kunjungan wisatawan. Potensi pariwisata MICE juga bisa dimaksimalkan dengan mempromosikan Jakarta sebagai pusat konferensi dan pameran internasional. Kerja sama dengan kota-kota global juga dapat membuka peluang pertukaran wisatawan, budaya, dan

bisnis, serta meningkatkan promosi Jakarta di dunia internasional.

Namun, Jakarta juga menghadapi berbagai ancaman yang dapat menghambat pengembangan pariwisatanya. Dampak perubahan iklim, seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut, dapat merusak infrastruktur pariwisata. Rencana relokasi ibu kota ke Kalimantan juga berpotensi menurunkan kunjungan bisnis dan pemerintahan, yang berdampak pada pendapatan sektor hotel, restoran, dan hiburan. Meskipun ada peningkatan infrastruktur transportasi, konektivitas antar kawasan wisata dan integrasi moda transportasi masih kurang optimal sehingga menghambat mobilitas wisatawan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan serta terbatasnya fasilitas seperti gedung konferensi dan pusat kuliner juga menjadi tantangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel berkontribusi signifikan terhadap PAD DKI Jakarta, dengan PDRB sektor pariwisata menunjukkan korelasi positif pada penerimaan pajak. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata untuk transformasi Jakarta menjadi kota global. Namun, efektivitas pemungutan pajak bervariasi antar wilayah, di mana Jakarta Selatan unggul dan Jakarta Timur kurang optimal. Digitalisasi pajak membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak, namun insentif perpajakan khusus pariwisata masih minim.

Jakarta memiliki keunggulan budaya dan bisnis yang bisa menarik wisatawan meski masih ada

keterbatasan fasilitas pejalan kaki, lahan parkir, dan promosi museum. Pengembangan MICE dan kolaborasi global menjadi peluang besar, tetapi Jakarta masih menghadapi tantangan seperti polusi, banjir, dan persaingan dengan kota lain.

Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pariwisata, memperkuat administrasi perpajakan, dan mempertimbangkan pajak sebagai instrumen pengatur dalam sektor ini. Langkah konkret meliputi insentif tarif pajak yang kompetitif dan reformasi tiga pilar: regulasi, infrastruktur, dan pariwisata. Kerja sama dengan maskapai, perbaikan fasilitas MICE, dan promosi internasional juga dapat meningkatkan daya saing Jakarta sebagai destinasi wisata global.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Dalam regresi pengaruh PDRB sektoral terhadap pajak daerah sektor pariwisata masih dimungkinkan terdapat variabel yang tidak teramati yang berubah antar waktu yang belum yang belum dapat diatasi dengan penggunaan metode *fixed effect model* sehingga masih berpotensi adanya bias. Selain itu, dalam analisis SWOT juga dipengaruhi oleh persepsi subjektivitas para pembuat keputusan, sehingga masih dimungkinkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman yang belum teridentifikasi yang membuat adanya potensi bias dalam hasil analisis.

REFERENSI

- Apriyanti, M. E., Subiyantoro, H., & Astuti, P. (2023). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada penyerapan tenaga kerja di setiap kabupaten Provinsi Bali Tahun 2019. *Journal of Applied Business & Economics (JABE)*, 9(4), 462-476. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i4.14995>
- Harefa, M. (2020). Dampak sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Belitung. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 65-77.
- Haryati, S. (2024). *Menguatkan ekonomi Jakarta menuju kota global. Edisi 1, 2024, Jakita Jakarta*. Diakses dari https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_1_2024.pdf.
- Kearney. (2023). The distributed geography of opportunity. The 2023: Global Cities Report. Diakses dari <https://www.kearney.com/documents/291362523/299003325/The+distributed+geography+of+opportunity-the+2023+Global+Cities+Report.pdf>.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- OECD (2014), "Taxation and tourism", in *OECD Tourism Trends and Policies 2014*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/tour-2014-6-en>.
- Prameswari, L. R. (2022). Dampak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kapuas hulu tahun 2014–2018: Impact of the tourism sector on regional original income (PAD) of kapuas hulu district 2014–2018. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 1(6), 1493-1514.

- Safarov, B., Taniev, A., & Janzakov, B. (2023). The impact of taxes on tourism business (In the example of Samarkand, Uzbekistan). *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 48(2spl), 792–797. <https://doi.org/10.30892/gtg.482spl13-1079>.
- Saputro, H. (2014). *Pengaruh jumlah objek wisata, kunjungan wisatawan nusantara, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta 2002-2012* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Sipayung, B., Hamzah, M.Z. & Aarsal, Y. (2024). Effect of VAT C-efficiency ratio, VAT buoyancy, and VAT elasticity on value added tax (VAT) revenue ratio in Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*, 3(2), 107–113. <https://doi.org/10.56282/jtlp.v3i2.515>.
- UN & CIAT. (2018). *Design and assessment of tax incentives in developing countries*. New York: United Nations & the Inter-American Center of Tax Administrations.
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 105-128.
- Wang, Q., Shen, C., & Zou, H. F. (2009). Local government tax effort in China: An analysis of provincial tax performance. *Region & Development* Nov, 29, 204-235.
- Widayanti, A., & Dewanti, D. S. (2017). Analisis pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan, terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(2), 101-109.
- Wooldridge, J. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach (7th ed.)*. Cengage.

Lampiran 1 Pemetaan Sektor Unggulan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis *Location Quotient* (LQ)

Kota madya/Sektor	PDRB 2023 (dalam miliar rupiah)	LQ thd Provinsi	LQ thd Nasional	Keterangan
Kota Adm. Jakarta Selatan	475,806.32			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	239.01	0.71	0.00	-
Industri Pengolahan	6,475.47	0.12	0.06	-
Pengadaan Listrik dan Gas	435.61	0.47	0.08	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	137.30	0.72	0.32	-
Konstruksi	49,113.66	0.96	1.03	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	68,504.26	0.91	1.06	-
Transportasi dan Pergudangan	11,353.36	0.58	0.51	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,964.74	0.86	1.29	-
Informasi dan Komunikasi	87,716.33	1.35	2.69	Sektor Unggulan
Jasa Keuangan dan Asuransi	64,601.57	1.27	3.22	Sektor Unggulan
Real Estat	35,421.64	1.23	2.55	Sektor Unggulan
Jasa Perusahaan	53,139.82	1.37	5.66	Sektor Unggulan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,433.09	1.33	1.33	Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan	17,193.49	0.83	1.18	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,973.75	1.12	1.75	Sektor Unggulan
Jasa lainnya	29,103.23	1.45	2.96	Sektor Unggulan
Kota Adm. Jakarta Timur	346,552.33			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	256.79	1.04	0.01	-
Industri Pengolahan	92,662.16	2.33	1.25	Sektor Unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas	1,143.23	1.68	0.30	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	214.87	1.54	0.68	-
Konstruksi	34,867.91	0.94	1.00	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,452.27	1.03	1.19	Sektor Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	21,847.53	1.53	1.34	Sektor Unggulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,244.36	1.02	1.53	Sektor Unggulan
Informasi dan Komunikasi	29,100.98	0.62	1.22	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,875.33	0.16	0.40	-
Real Estat	17,396.73	0.83	1.72	-
Jasa Perusahaan	19,686.28	0.70	2.88	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,180.95	0.82	0.82	-
Jasa Pendidikan	21,164.77	1.39	2.00	Sektor Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,114.55	1.04	1.63	Sektor Unggulan
Jasa lainnya	11,343.63	0.77	1.59	-
Kota Adm. Jakarta Pusat	506,554.14			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.77	0.09	0.00	-
Industri Pengolahan	4,097.38	0.07	0.04	-
Pengadaan Listrik dan Gas	890.88	0.89	0.16	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77.30	0.38	0.17	-
Konstruksi	40,989.57	0.75	0.81	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	77,655.19	0.97	1.12	-
Transportasi dan Pergudangan	12,385.24	0.59	0.52	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,707.61	1.12	1.68	Sektor Unggulan
Informasi dan Komunikasi	62,419.86	0.90	1.80	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	120,044.46	2.21	5.62	Sektor Unggulan
Real Estat	29,174.76	0.95	1.97	-
Jasa Perusahaan	47,396.08	1.15	4.74	Sektor Unggulan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,045.22	1.78	1.78	Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan	23,679.78	1.07	1.53	Sektor Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,936.93	0.96	1.50	-
Jasa lainnya	20,022.12	0.93	1.91	-
Kota Adm. Jakarta Barat	363,931.25			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	228.94	0.89	0.01	-
Industri Pengolahan	18,653.67	0.45	0.24	-
Pengadaan Listrik dan Gas	550.99	0.77	0.14	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	166.70	1.14	0.50	-
Konstruksi	44,911.89	1.15	1.23	Sektor Unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	59,551.10	1.04	1.20	Sektor Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	19,837.86	1.32	1.16	Sektor Unggulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,270.60	1.03	1.54	Sektor Unggulan
Informasi dan Komunikasi	89,949.49	1.81	3.60	Sektor Unggulan

Lampiran 1 Pemetaan Sektor Unggulan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis *Location Quotient* (LQ) – Lanjutan

Kota madya/Sektor	PDRB 2023 (dalam miliar rupiah)	LQ thd Provinsi	LQ thd Nasional	Keterangan
Jasa Keuangan dan Asuransi	24,214.94	0.62	1.58	-
Real Estat	22,864.67	1.04	2.15	Sektor Unggulan
Jasa Perusahaan	23,603.04	0.79	3.29	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,555.67	0.30	0.30	-
Jasa Pendidikan	16,456.37	1.03	1.48	Sektor Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,550.90	1.05	1.64	Sektor Unggulan
Jasa lainnya	12,564.42	0.82	1.67	-
Kota Adm. Jakarta Utara	364,818.97			-
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	437.89	1.69	0.01	-
Industri Pengolahan	113,947.08	2.73	1.47	Sektor Unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas	1,028.13	1.43	0.26	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	230.95	1.57	0.69	-
Konstruksi	50,996.85	1.30	1.39	Sektor Unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	62,339.29	1.08	1.25	Sektor Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	19,371.14	1.29	1.13	Sektor Unggulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,400.88	0.98	1.47	-
Informasi dan Komunikasi	12,139.41	0.24	0.48	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,231.44	0.16	0.40	-
Real Estat	19,728.09	0.89	1.85	-
Jasa Perusahaan	24,316.99	0.82	3.38	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,168.10	0.35	0.35	-
Jasa Pendidikan	11,722.92	0.73	1.05	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,663.16	0.81	1.27	-
Jasa lainnya	14,096.63	0.91	1.87	-
Kabupaten Adm. Kep. Seribu	3,305.24			-
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	270.47	115.13	0.66	-
Pertambangan dan Penggalian	2,094.15	623.55	8.18	Sektor Unggulan
Industri Pengolahan	175.38	0.46	0.25	-
Pengadaan Listrik dan Gas	1.52	0.23	0.04	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.92	1.44	0.64	-
Konstruksi	96.68	0.27	0.29	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	211.41	0.41	0.47	-
Transportasi dan Pergudangan	16.66	0.12	0.11	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	137.09	0.85	1.27	-
Informasi dan Komunikasi	46.26	0.10	0.20	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.23	0.04	0.09	-
Real Estat	10.19	0.05	0.11	-
Jasa Perusahaan	18.35	0.07	0.28	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	47.34	0.44	0.44	-
Jasa Pendidikan	26.93	0.19	0.27	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.45	1.03	1.61	Sektor Unggulan
Jasa lainnya	61.21	0.44	0.90	-
DKI Jakarta	2,060,968.26			-
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,464.88		0.01	-
Pertambangan dan Penggalian	2,094.15		0.01	-
Industri Pengolahan	236,011.15		0.54	-
Pengadaan Listrik dan Gas	4,050.36		0.18	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	829.05		0.44	-
Konstruksi	220,976.56		1.07	Sektor Unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	324,713.52		1.16	Sektor Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	84,811.79		0.87	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,725.28		1.50	Sektor Unggulan
Informasi dan Komunikasi	281,372.33		1.99	Sektor Unggulan
Jasa Keuangan dan Asuransi	220,980.97		2.54	Sektor Unggulan
Real Estat	124,596.07		2.07	Sektor Unggulan
Jasa Perusahaan	168,160.56		4.14	Sektor Unggulan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	66,430.37		1.00	Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan	90,244.25		1.43	Sektor Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,315.74		1.56	Sektor Unggulan
Jasa lainnya	87,191.23		2.05	Sektor Unggulan

Sumber: Diolah peneliti

Lampiran 2 *Tax Effort* Pajak Daerah Sektor Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2014-2023*Tax Effort* Pajak Daerah Sektor Pariwisata

Kota madya	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rata-rata
Jakarta Utara	2.28%	2.36%	2.47%	2.43%	2.41%	2.31%	1.17%	1.18%	1.88%	2.02%	2.05%
Jakarta Selatan	2.91%	2.81%	2.90%	2.89%	3.02%	3.09%	1.60%	1.72%	2.52%	2.68%	2.61%
Jakarta Timur	0.81%	0.89%	0.99%	1.01%	1.19%	1.22%	0.74%	0.77%	0.92%	0.92%	0.95%
Jakarta Pusat	3.20%	3.11%	3.10%	2.89%	3.05%	2.87%	1.38%	1.37%	2.07%	2.36%	2.54%
Jakarta Barat	1.98%	2.01%	2.15%	2.13%	2.20%	2.22%	1.19%	1.17%	1.66%	1.73%	1.85%
Provinsi DKI Jakarta	2.41%	2.40%	2.47%	2.41%	2.52%	2.48%	1.28%	1.31%	1.92%	2.07%	2.13%

Tax Effort Pajak Hotel

Kota madya	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rata-rata
Jakarta Utara	0.71%	0.74%	0.75%	0.72%	0.71%	0.66%	0.37%	0.42%	0.61%	0.67%	0.64%
Jakarta Selatan	2.05%	1.84%	1.84%	1.90%	2.05%	1.98%	0.98%	1.11%	1.72%	2.01%	1.75%
Jakarta Timur	0.22%	0.24%	0.26%	0.24%	0.23%	0.23%	0.12%	0.13%	0.14%	0.15%	0.20%
Jakarta Pusat	2.72%	2.52%	2.40%	2.26%	2.42%	2.17%	1.06%	1.04%	1.61%	1.82%	2.00%
Jakarta Barat	0.84%	0.74%	0.76%	0.71%	0.70%	0.71%	0.36%	0.37%	0.54%	0.60%	0.63%
Provinsi DKI Jakarta	1.50%	1.39%	1.36%	1.32%	1.39%	1.29%	0.64%	0.67%	1.02%	1.16%	1.17%

Tax Effort Pajak Restoran

Kota madya	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rata-rata
Jakarta Utara	1.95%	2.11%	2.27%	2.35%	2.54%	2.55%	1.55%	1.57%	2.26%	2.37%	2.15%
Jakarta Selatan	3.54%	3.64%	3.89%	4.05%	4.32%	4.71%	2.94%	2.96%	4.27%	4.43%	3.87%
Jakarta Timur	0.85%	0.97%	1.09%	1.19%	1.47%	1.56%	1.09%	1.10%	1.30%	1.28%	1.19%
Jakarta Pusat	1.77%	1.78%	1.90%	1.93%	2.06%	2.11%	1.23%	1.24%	1.76%	1.90%	1.77%
Jakarta Barat	1.62%	1.70%	1.88%	2.01%	2.11%	2.20%	1.49%	1.50%	2.02%	2.02%	1.86%
Provinsi DKI Jakarta	1.98%	2.07%	2.23%	2.33%	2.51%	2.64%	1.65%	1.66%	2.32%	2.41%	2.18%

Tax Effort Pajak Hiburan

Kota madya	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rata-rata
Jakarta Utara	1.67%	1.60%	1.68%	1.55%	1.32%	1.18%	0.33%	0.14%	0.68%	0.83%	1.10%
Jakarta Selatan	0.53%	0.53%	0.60%	0.54%	0.56%	0.51%	0.14%	0.06%	0.19%	0.26%	0.39%
Jakarta Timur	0.32%	0.33%	0.38%	0.34%	0.41%	0.36%	0.10%	0.06%	0.14%	0.19%	0.26%
Jakarta Pusat	0.75%	0.96%	1.04%	0.80%	0.86%	0.77%	0.19%	0.06%	0.28%	0.58%	0.63%
Jakarta Barat	1.04%	1.20%	1.30%	1.16%	1.23%	1.18%	0.30%	0.11%	0.40%	0.53%	0.84%
Provinsi DKI Jakarta	0.81%	0.87%	0.95%	0.83%	0.83%	0.75%	0.20%	0.08%	0.31%	0.45%	0.61%

Sumber: Diolah peneliti